

PROFIL DAN PERANAN ORGANISASI LOKAL DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT

Nurdin Widodo* dan Suradi**

Abstract

Agenda 21 is an action plan of United Nations (UN) related to sustainable development and was at outcome of the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) held in Rio De Janeiro, Brazil, in 1992. It is a comprehensive blueprint of action to be taken globally, nationally, locally by organizations of the UN governments, and major groups in every area in which humans directly affect the environment, in a concept the broadly called, "Think Globally, Act Locally". Different various research has showed that, local organizations-as a social medium for local community participation, are giving it's real and meaningful contribution to the cause of community development. In that context, the on-going rise and development of local organizations throughout Indonesian civil societies need to be crucially considered as a tools of instrument and strategy to strenghtened our community development

Keywords: local organization, community development, civil society

Abstrak

Agenda 21 yang merupakan komitmen dunia terhadap pembangunan yang berpusat pada manusia, mengembangkan sebuah konsep "berpikir global, bertindak lokal". Konsep ini telah ditindaklanjuti di dalam deklarasi IULA (International Union of Local Authorities) dan EU (European Union), dimana adanya keharusan bagi otoritas lokal di seluruh dunia memberikan prioritas untuk partisipasi bagi organisasi lokal. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa organisasi lokal sebagai wahana partisipasi masyarakat lokal, telah memberikan kontribusi yang nyata dan bermakna dalam pembangunan. Sehubungan dengan itu, organisasi lokal yang tumbuh dan berkembang di seluruh lapisan masyarakat Indonesia, perlu dipertimbangkan sebagai instrumen dan strategi dalam pembangunan masyarakat.

Kata-kata kunci : Organisasi Lokal, Pengembangan/Pembangunan Masyarakat, Masyarakat Madani

I. PENDAHULUAN

Pengalaman masa lalu telah memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia, bahwa pembangunan yang dilaksanakan dengan pendekatan *top-down* dengan system sentralistis, tidak berhasil di bidang sosial maupun politik; meskipun di bidang ekonomi

cukup menggembirakan. Implementasi pendekatan dan system pembangunan tersebut mengakibatkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, bukan dalam pengertian partisipasi, tetapi lebih pada mobilisasi. Karena itu, kegiatan pembangunan menjadikan

* Drs. Nurdin Widodo, M.Si, Peneliti Madya Puslitbang Kessos

** Drs. Suradi, M.Si, Peneliti Madya Puslitbang Kessos

masyarakat semakin bergantung pada pemerintah. Masyarakat menjadi kurang percaya diri, tidak kreatif dan tidak inovatif.

Secara politik, dengan pendekatan *top-down* dan sistem sentralistis tersebut hak-hak masyarakat terserap ke dalam kepentingan pemerintah, sehingga tidak muncul pemikiran kritis dari masyarakat sebagai kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memudar yang diakibatkan oleh mudurnya sejumlah lembaga tradisional yang dulu hidup di pedesaan, sebagai akibat intervensi pemerintah yang terlalu jauh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Respon terhadap pendekatan pembangunan tersebut antara lain dengan berkembangnya diskusi tentang *civil society* di kalangan perguruan tinggi maupun organisasi non pemerintah. Wacana *civil society* ini tampaknya menyadarkan para penyelenggara negara untuk menemukan pendekatan baru dalam kebijakan pembangunan yang benar-benar berpihak pada kebutuhan rakyat, yang mengedepankan demokrasi dan hak asasi manusia. Berbagai seminar, semiloka dan *workshop* dilaksanakan oleh berbagai pihak untuk merumuskan model pembangunan yang mengakomodasi konsep *civil society* tersebut.

Terkait dengan wacana *civil society* ini berkembang pemikiran bahwa mewujudkan bangsa yang demokratis harus dimulai dari bawah atau dari masyarakat akar rumput karena berdasarkan pengalaman dan kajian, di kalangan masyarakat akar rumput tersebut selama berabad-abad telah terjadi praktek-praktik demokrasi yang benar. Dengan demikian, apabila bangsa Indonesia hendak mewujudkan pembangunan yang demokratis, kita belajar (kembali) tentang kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat akar rumput. Sehubungan dengan itu, penelitian ini perlu dilakukan dalam upaya (1) mendeskripsikan profil organisasi lokal yang meliputi aspek organisasi, kegiatan dan jaringan kerja, dan (2) peranan organisasi lokal dalam

pembangunan masyarakat. Hasil penelitian ini akan menjadi bahan masukan dalam rangka pemberdayaan organisasi lokal dalam pembangunan masyarakat yang lebih optimal.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Masyarakat Indonesia betapapun mereka hidup sederhana, telah mengembangkan mekanisme dalam upaya memenuhi kebutuhan, menjangkau sumber dan pelayanan serta berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Mekanisme tersebut dilembagakan dalam sebuah wahana yang berupa organisasi, baik yang dilandasi oleh keagamaan, kesukuan maupun etnis. Di berbagai wilayah di Indonesia, selama ini dikenal istilah "*Mapalus*" di Sulawesi Utara, "*Banjar*" di Bali, "*Todung Natolu*" di Sumatera Utara, dan "*Rereyongan Sarupi*" di Jawa Barat. Nilai sosial budaya lokal atau kearifan lokal tersebut telah terlembaga dengan baik dalam masyarakat lokal, dan menjiwai semua aktivitas masyarakat lokal tersebut.

Dengan demikian menjadi jelas, bahwa keberadaan organisasi yang telah tumbuh dan berkembang pada masyarakat lokal, telah menjadi alternatif mekanisme pemecahan masalah. Organisasi yang ada di masyarakat memperlihatkan ciri-ciri, seperti egalitarianisme, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, keterbukaan partisipasi bagi seluruh anggota, penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme serta mengembangkan musyawarah. Ciri-ciri organisasi lokal ini telah mengakomodasi unsur hak asasi manusia dan demokratisasi pada tingkat lokal. Karena itu, apabila berbagai ciri yang melekat pada organisasi lokal ini dapat dipertahankan, akan semakin memperkuat ketahanan sosial masyarakat dalam nuansa pluralisme.

Sehubungan dengan itu, organisasi dan kearifan lokal, yang tumbuh dan berkembang di masyarakat lokal, perlu diberikan ruang gerak yang luas agar dapat mengekspresikan dan mengartikulasikan berbagai kebutuhan masyarakat lokal. Lebih jauh dari itu,

berkembangnya keswadayaan masyarakat dan peran aktifnya dalam pembangunan, khususnya pembangunan kesejahteraan sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Korten (1982), bahwa pembangunan akan mampu mengembangkan keswadayaan masyarakat apabila pembangunan itu berorientasi pada kebutuhan masyarakat (*people centered development*). Pembangunan yang berpusat pada masyarakat itu dapat direalisasikan apabila memanfaatkan organisasi lokal yang ada di masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembangunan pedesaan, Sediono Tjandronegoro (Kompas, 1982) mengemukakan, bahwa bentuk kelompok informal yang tumbuh dari bawah dan berciri demokratik, merupakan wadah bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pembinaan kelompok informal ini menyebabkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat desa bisa efektif. Pemikiran ini sesuai dengan Agenda 21 yang menekankan tanggung jawab khusus dari otoritas lokal dengan konsep "*berpikir global, bertindak lokal*", dan deklarasi IULA (*International Union of Lokal Authorities*) dan EU (*European Union*) tahun 1985, dimana adanya keharusan bagi otoritas lokal di seluruh dunia memberikan prioritas untuk partisipasi bagi organisasi lokal, perusahaan swasta, perempuan dan pemuda, dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan implementasi proyek-proyek lokal dan perencanaan "Agenda 21" atau semua hal yang bersifat lokal (Bakhit, 2001).

Dalam perspektif pekerjaan sosial, nilai sosial budaya dan organisasi lokal tersebut merupakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) atau modal sosial (*social capital*) dalam rangka pembangunan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan organisasi dan kearifan lokal tersebut memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan masyarakat. Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan penelitian dalam upaya menemukan profil dan peranan organisasi lokal.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dalam upaya memperoleh gambaran tentang profil dan peranan organisasi lokal dalam pembangunan masyarakat. Sehubungan dengan itu, metode penelitian yang dipilih yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini dilaksanakan di Jawa Timur (Maluku), DI Yogyakarta (Jawa Timur), Sulawesi Selatan (Sulawesi Tenggara), Bali (Gorontalo), Kalimantan Tengah (Papua) dan Sumatera Barat (Maluku Utara). Penentuan lokasi secara *purposive*, namun demikian diharapkan bisa menggambarkan profil dan peranan organisasi di kawasan Sumatera, Jawa - Bali, Sulawesi dan Kalimantan. Pada masing-masing provinsi dipilih satu kota/ kabupaten dan satu kecamatan. Kemudian pada setiap kecamatan dipilih dua desa yang mewakili tipe perkotaan dan perdesaan. Selanjutnya pada setiap desa dipilih tiga organisasi sosial lokal. Dari penentuan kota /kabupaten sampai dengan penentuan organisasi social lokal dilakukan secara *purposive* berdasarkan kriteria lama melakukan kegiatan minimal 2 tahun, memiliki kegiatan yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat lokal, dan ada kepengurusan meskipun sederhana.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, yaitu mempelajari berbagai jenis dokumen yang relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian wawancara secara individu maupun kelompok kepada pengelola dan anggota organisasi lokal, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada pengelola organisasi lokal dan aparat desa setempat.

Data dan informasi yang dijaring dalam penelitian ini seluruhnya adalah data kualitatif. Sehubungan dengan itu data yang sudah dikumpulkan diolah dalam bentuk mengkategorisasi, tidak ada tabulasi. Kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan memusatkan pada aspek organisasi, kegiatan dan jaringan kerja.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Organisasi Lokal

Dari hasil penelitian diketahui, bahwa organisasi lokal di daerah mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Bentuk perkumpulan sosial

Organisasi yang didirikan oleh masyarakat setempat pada lingkup wilayah tertentu (RT, RW, Dusun, kampung, desa/kelurahan) merupakan unsure dari organisasi lokal. Dilihat dari bentuknya, organisasi lokal ini cukup bervariasi, seperti majelis ta'lim/ pengajian/ yasinan, paguyuban warga, perkumpulan suku tertentu, perkumpulan remaja, perkumpulan adat, ikatan pemuda masjid, pemuda Katolik/Kristen, pemuda Hindu/Budha, perkumpulan kematian, perkumpulan arisan, lembaga keuangan masyarakat, perkumpulan kesenian, perkumpulan olah raga, lembaga musyawarah adat, ikatan keluarga, ikatan suka duka, dana sehat dan organisasi. Pemberian nama pada organisasi lokal tersebut dengan menggunakan nama khas daerah atau agama tertentu. Di Nusa Tenggara Barat misalnya, terdapat organisasi yang diberi nama "Banjar Dharma Prawedhi" yang memiliki kegiatan memberikan santunan terhadap keluarga tidak mampu. Di Sumatera Barat terdapat organisasi yang di berinama "Tani Saiyo Geragahan", yang memiliki kegiatan memberikan bantuan bagi masyarakat yang mengalami musibah atau duka cita.

Adapun cara pembentukan organisasi ada dua, yaitu *pertama*, berdiri secara alamiah berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, seperti perkumpulan pengajian, keagamaan, ikatan keluarga, ikatan kesukuan dan marga, kelompok arisan, kelompok kesenian dan olah raga dan adat. Organisasi ini cenderung adaptif dengan kemampuan lokal, dengan mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya lokal, tradisi an kebiasaan, serta sumber daya lokal. Kedua, perkumpulan yang pembentukannya diprakarsai

oleh pemerintah. Organisasi ini merupakan kepanjangan tangan pemerintah kepada masyarakat, seperti KUBE, PKK, Posyandu dan sebagainya.

2. Keanggotaan

Keanggotaan organisasi lokal didasari pendidikan tertentu, keterampilan, persamaan agama, keturunan, persamaan suku, persamaan pekerjaan, kepedulian sosial, persamaan kepentingan, domisili di wilayah tertentu (RT/ RW/Desa) dan multi-kultur. Keanggotaan di dalam organisasi lokal pada umumnya bersifat sukarela, mempunyai hubungan interpersonal dan biasanya memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat. Organisasi lokal dengan anggota suku/etnis tertentu biasanya didirikan di kota-kota besar yang bertujuan sebagai ikatan kekerabatan di antara anggotanya, misalnya organisasi suku Jawa, Sunda, Minang dan lain-lain.

Menjadi anggota sebuah perkumpulan tidak sulit, biasanya melalui informasi dari keluarga, teman atau orang lain. Cara menjadi anggota biasanya langsung bergabung saja, ada yang mendaftar secara lisan dan ada pula yang harus mendaftarkan diri secara tertulis melalui formulir yang disediakan. Hak dan kewajiban anggota biasanya sudah dirumuskan dalam suatu organisasi dalam bentuk kesepakatan lisan maupun tertulis. Kesepakatan tertulis ini biasanya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Hak dan kewajiban anggota di antara perkumpulan memiliki banyak persamaan antara lain hak untuk memperoleh pendidikan, mengikuti pengajian, memperoleh arisan, memperoleh bantuan sosial dan mengikuti setiap kegiatan perkumpulan. Sedangkan kewajiban anggota antara lain menghadiri pertemuan rutin, iuran wajib, iuran sukarela, mengikuti arisan wajib dan keharusan mengikuti kegiatan perkumpulan secara aktif.

3. Jangkauan wilayah

Pada umumnya wilayah kegiatan organisasi pada tingkat RT, RW, dusun/

kampung dan desa/kelurahan. Hal ini sesuai dengan karakteristik dari organisasi, yang awal pendiriannya didasarkan pada tujuan memberikan pelayanan sosial dengan prinsip dari, untuk dan oleh masyarakat lokal.

Namun demikian dalam pelaksanaan kegiatan, ada di antara mereka yang sudah mampu mengembangkan jaringan keja hingga sampai wilayah kecamatan, kabupaten/kota hingga luar wilayah. Sebagai contoh, perkumpulan arisan yang didirikan oleh kelompok masyarakat tertentu di beberapa propinsi jangkauannya bisa sampai ke luar wilayahnya. Sedangkan tempat kegiatan dilaksanakan secara bergantian sesuai dengan kesepakatan anggotanya misalnya kegiatan pengajian dan arisan. Mengenai jangkauan wilayah ini sebenarnya bukan menjadi persoalan, karena memang begitu adanya. Pihak luar tidak bisa memaksakan bahwa organisasi memperluas jangkauan wilayah kerjanya, kalau memang komitmen para anggota menghendaki hanya pada wilayah tertentu. Lebih penting dari itu, bahwa organisasi dengan jangkauan wilayah tertentu tersebut, dapat membentuk dan mengembangkan jejaring kerja dengan organisasi lainnya, sehingga potensi yang ada pada mereka dapat disinergikan untuk kepentingan sebuah program yang dampaknya menjangkau banyak orang.

4. Sumber dana

Aktivitas perkumpulan perlu didukung oleh dana yang memadai sehingga kegiatan perkumpulan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan. Informasi tertulis dari berbagai propinsi, terdapat banyak kesamaan cara organisasi lokal dalam menghimpun dana, yang antara lain:

a. Iuran anggota

Pada umumnya, anggota organisasi lokal menyumbangkan dana ke kas perkumpulan yang besarnya berkisar Rp1000 – Rp2500 per bulan. Dana ini ditangani oleh seseorang, dan dilaporkan setiap bulan pada saat pertemuan. Sumber dari iuran anggota ini,

merupakan dana utama pada semua organisasi lokal, yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan rutin organisasi. Hal ini menggambarkan, bahwa organisasi lokal telah mampu secara swadaya membiayai program dan kegiatannya, tanpa harus bergantung pada pihak luar.

b. Sumbangan masyarakat

Secara insidental, organisasi lokal menerima bantuan dana dari masyarakat, baik diminta maupun tidak. Dana dari sumbangan masyarakat tersebut untuk membiayai program dan kegiatan yang sifatnya insidental, seperti peringatan hari besar nasional maupun hari besar keagamaan. Untuk mendapatkan dana tersebut, pengurus mengajukan proposal kepada masyarakat dengan menyebutkan kegiatan yang akan dilaksanakan dan jumlah dana yang diperlukan.

c. Bantuan Dunia usaha

Sebagaimana dana yang bersumber dari sumbangan masyarakat, secara insidental organisasi lokal menerima bantuan dana dari dunia usaha. Dana dari sumbangan dunia usaha tersebut untuk membiayai program dan kegiatan yang sifatnya insidental, seperti peringatan hari besar nasional maupun hari besar keagamaan. Untuk mendapatkan dana tersebut, pengurus mengajukan proposal kepada dunia usaha dengan menyebutkan kegiatan yang akan dilaksanakan dan jumlah dana yang diperlukan.

d. Subsidi pemerintah

Sebagian kecil organisasi lokal menerima bantuan dana dari sub sidi pemerintah. Perkumpulan yang menerima subsidi pemerintah ini, adalah organisasi yang selama ini “menjadi kepanjangan tangan pemerintah”, seperti Posyandu, Karang Taruna dan UEP.

e. Hasil usaha organisasi (usaha ekonomis)

Sebagian kecil organisasi telah memiliki usaha ekonomis produktif, sehingga mampu membiayai program dan kegiatan yang

dilaksanakannya. Bentuk usaha ekonomis produktif tersebut antara lain, memasarkan makanan/jajanan, kerajinan dan simpan pinjam. Organisasi yang demikian ini telah memperluas programnya pada kegiatan sosial, ekonomi, dan peningkatan keterampilan.

B. KEGIATAN ORGANISASI LOKAL

Pencermatan terhadap kegiatan organisasi lokal ini perlu dilakukan, dalam upaya menemukan bidang-bidang apa saja yang telah dilaksanakan oleh organisasi lokal. Seberapa besar aktivitas di bidang kesejahteraan sosial menjadi perhatian organisasi lokal. Dengan pengetahuan mengenai jenis kegiatan, dapat diketahui besarnya kontribusi organisasi lokal tersebut di bidang sosial kemasyarakatan, khususnya di bidang kesejahteraan sosial.

1. Kegiatan

Kegiatan organisasi lokal di berbagai daerah cukup bervariasi sesuai dengan tujuannya. Dari informasi yang dikumpulkan dari berbagai daerah, kegiatan organisasi lokal dapat dikelompokkan menjadi enam kelompok yakni:

- a. Kegiatan dalam upaya memperkuat lembaga adat/kebudayaan, yang meliputi: mengurus tata cara pernikahan sesuai adat, pelaksanaan kegiatan sunatan, mengurus upacara kematian sesuai adat dan pelestarian kebudayaan.

Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi lokal tersebut di atas menggambarkan, bahwa kegiatan organisasi lokal telah menjangkau permasalahan yang terjadi di dalam siklus kehidupan manusia dalam lingkup kebudayaan lokal. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan bantuan ekonomis bagi anggota atau warga organisasi, disamping bertujuan untuk memelihara nilai sosial budaya sebagai potensi lokal. Kegiatan pelestarian

kebudayaan, perlu memperoleh apresiasi karena ketahanan sosial suatu masyarakat dapat diwujudkan melalui pemeliharaan kebudayaan ini.

- b. Pengembangan kegiatan olah raga dan kesenian. Jenis kesenian seperti: rebana/qosidah, tari-tarian modern, taria-tarian tradisional, kesenian asli daerah. Kemudian jenis olah raga seperti: sepak bola, volley, tenis meja dan lain.

Kesenian dan olah raga perlu dipahami sebagai bagian dari kebudayaan bangsa. Oleh karena itu, komitmen terhadap pembangunan masyarakat tidak dapat mengabaikan kesenian dan olah raga yang dikembangkan oleh masyarakat lokal. Sebagai bagian dari kebudayaan, kesenian tradisional yang dikembangkan oleh masyarakat sarat dengan pendidikan dan pesan moral, yang mengajar seluruh masyarakat untuk hidup dalam keselarasan antara duniawi dan ukhrowi. Mengajarkan manusia memiliki kearifan terhadap alam dan lingkungannya; mengajarkan perdamaian, pengorbanan dan kasih sayang. Permasalahannya, dewasa ini seiring dengan terjadinya perubahan sosial akibat globalisasi dengan segala dampaknya, dimana kesenian tradisional atau asli daerah sudah mulai kurang diminati oleh generasi muda. Sebaliknya, generasi muda lebih tertarik untuk mengembangkan kesenian kontemporer, yang merupakan adopsi kebudayaan mancanegara. Dengan menempatkan kesenian tradisional sebagai kebudayaan asli bangsa atau sebagai salah satu unsur identitas sebagai suatu bangsa, maka kelestariannya perlu mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Sehingga upaya-upaya yang telah dilakukan oleh organisasi lokal dalam pelestarian kesenian tradisional ini, menjadi sebuah upaya pembangunan bangsa.

- c. Kegiatan keagamaan, seperti pengajian/yasinan, pendalaman rohani, peringatan Hari

Besar Agama, pengumpulan dan penyembelihan hewan kurban, sunatan masal, pengelolaan Taman Pendidikan Al Qur'an dan pengurusan kematian/jenazah.

Kegiatan keagamaan terkait dengan persoalan mental atau moral. Dari sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi di bidang keagamaan tersebut, menunjukkan bahwa aspek moral menjadi perhatian sebagian besar organisasi lokal. Dewasa ini masyarakat berada di tengah arus kehidupan materialisme dan sekuler bersamaan dengan gelombang globalisasi. Meskipun demikian, ternyata pada masyarakat akar rumput persoalan moral masih menjadi perhatian yang sangat besar. Organisasi lokal tersebut memiliki kegiatan keagamaan yang menjangkau berbagai kebutuhan masyarakat, baik sebagai individu maupun kolektivitas. Hal ini menggambarkan, bahwa pada masyarakat akar rumput masih ada filter terhadap gelombang globalisasi dalam bentuk pembinaan keagamaan.

- d. Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial, seperti santunan yatim piatu, santunan fakir miskin, santunan anak putus sekolah, santunan keluarga miskin, santunan lanjut usia terlantar, santunan anak cacat, santunan pendidikan, santunan kematian, bakti sosial, penyuluhan sosial, penyantunan anggota yang mengalami musibah dan pengumpulan dana untuk kegiatan sosial

Informasi kegiatan organisasi di bidang usaha kesejahteraan sosial (UKS) tersebut di atas merupakan informasi yang menggambarkan, bahwa kegiatan UKS menjadi perhatian masyarakat akar rumput. Dari jenis sasaran pelayanan sosial tersebut, pada umumnya organisasi lokal menjangkau penyandang masalah konvensional. Jenis-jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut, yaitu (1) anak terlantar dan yatim piatu, (2) lanjut usia, (3) keluarga miskin, dan (4) penyandang cacat. Sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, dasar dari

pemberian pelayanan sosial tersebut masih terbatas pada rasa belas kasihan (*motif karitas*) dan keagamaan (*motif pilantropis*). Meskipun demikian, apa yang telah dilakukan oleh organisasi lokal tersebut perlu mendapatkan apresiasi dari pemerintah, karena mereka telah memberikan sumbangan yang nyata dan bermakna dalam pembangunan masyarakat lokal.

- e. Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pengrajin kue, pembuatan makanan, pertukangan, pinjaman dana bergulir, koperasi, simpan pinjam, mendirikan lumbung pangan, pertanian, jimpitan, penyewaan peralatan pesta, penyewaan group tari, usaha menjahit, bengkel dan meubel.

Pencermatan terhadap jenis-jenis kegiatan di bidang ekonomi tersebut, menggambarkan bahwa organisasi lokal di samping melaksanakan kegiatan di bidang sosial dan keagamaan, juga melaksanakan kegiatan di bidang ekonomi. Dilihat dari jenis-jenis kegiatannya, pada umumnya kegiatan ekonomis yang berpihak pada ekonomi kerakyatan. Apa yang dilakukan organisasi di bidang ekonomis ini, merupakan respon terhadap kebijakan pemerintah yang selama ini lebih berpihak investor atau konglomerat. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi kerakyatan ini, organisasi lokal perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan kegiatannya secara berkesinambungan.

Mencermati berbagai jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi lokal tersebut, menunjukkan bahwa organisasi lokal telah menjangkau semua sector kehidupan masyarakat, yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan mental spiritual. Bahkan yang menarik, organisasi lokal telah menjangkau para penyandang masalah sosial di lingkungannya. Hal ini merupakan fenomena gerakan *civil society* di tingkat masyarakat akar rumput yang merupakan

modal sosial bagi upaya pembangunan. Apabila gerakan *civil society* akar rumput ini memperoleh iklim yang kondusif, maka demokrasi pada tingkat lokal akan berkembang yang pada akhirnya akan mengembangkan demokrasi pada tingkat yang lebih luas. *Civil society* sebagai instrumen pembangunan demokrasi ini perlu dijadikan sebuah kerangka pikir semua pihak (*stakeholders*), sehingga aktivitas pembangunan mampu menjawab kebutuhan masyarakat seiring dengan dinamika perubahan sosial.

2. Jangkauan kegiatan

Organisasi dalam rekrutmen anggotanya cukup bervariasi, sesuai dengan tujuan pendirian dan sasaran yang akan dicapai. Dalam pelaksanaan kegiatannya, tampak ada keterkaitan antara rekrutmen anggota ini dengan sasaran penerima pelayanan. Berbagai sasaran pelayanan organisasi didasarkan pada: agama tertentu, berbagai pemeluk agama, jenjang pendidikan tertentu saja, laki-laki dan perempuan, khusus laki-laki, khusus perempuan, tidak memandang latar belakang agama, ekonomi dan sosial; kelompok umur tertentu dan semua umur.

Melihat jangkauan organisasi lokal tersebut, menunjukkan bahwa ada variasi keanggotaan pada organisasi, yaitu menurut agama, jenis kelamin, pendidikan, umur dan kultur. Dengan demikian organisasi lokal telah menjangkau berbagai lapisan sosial dalam masyarakat akar rumput. Keanekaragaman tersebut merupakan kenyataan yang menggambarkan, bahwa organisasi lokal telah berhasil mengorganisasikan orang-orang yang memiliki perbedaan secara sosial, ekonomi dan budaya. Dalam kerangka pembangunan masyarakat, karakteristik keanggotaan organisasi lokal ini merupakan modal sosial bagi upaya mewujudkan kedamaian sosial.

C. SISTEM JARINGAN KERJA

Organisasi lokal pada umumnya terbuka dalam mengembangkan kerjasama dengan organisasi sosial/LSM maupun dengan pemerintah. Jaringan kerja dengan organisasi sosial/LSM dan pemerintah daerah setempat di sebagian besar propinsi pada umumnya telah terjalin dengan baik. Namun demikian di sebagian daerah jalinan kerjasama ini masih belum terlihat. Jaringan kerja organisasi lokal, baik dengan organisasi sosial maupun dengan pemerintah daerah setempat di berbagai daerah antara lain:

1. Bentuk kerjasama dan koordinasi dengan Organisasi Sosial/LSM antara lain dalam kegiatan santunan anak terlantar/yatim/jompo, khitanan masal, penyuluhan, pelatihan keterampilan, bantuan dana, peringatan Hari Besar Agama, pembangunan sarana ibadah dan pengumpulan dana.

Informasi mengenai bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi yang bekerja sama dengan Orsos/LSM tersebut dapat dikelompokkan menjadi kegiatan ekonomis (pelatihan keterampilan, bantuan dana), mental spiritual (pembangunan sarana ibadah, peringatan hari besar agama), dan sosial (pengumpulan dana, santunan anak dan jompo telantar, khitanan massal dan penyuluhan sosial). Kerja sama yang dibangun oleh organisasi dengan Orsos/LSM tersebut telah menjangkau berbagai bidang kehidupan masyarakat. Dari kerjasama tersebut, yang menarik bahwa adanya kerja sama di bidang kesejahteraan sosial, yaitu dalam penyantunan jompo, anak terlantar dan penyuluhan sosial. Hal ini menggambarkan, bahwa organisasi lokal memiliki komitmen yang besar dalam bidang kesejahteraan sosial yang mungkin pada saat ini belum diperhitungkan oleh instansi sosial di daerah.

2. Bentuk kerjasama dengan pemerintah, yaitu: pengajian, pembangunan sarana ibadah,

olah raga dan kesenian, sunatan masal, bantuan dana, pelayanan masyarakat, Posyandu, pendataan PMKS, pemungutan PBB, kebersihan dan keamanan lingkungan, KUBE, diklat PSM/Pekerja Sosial dan bantuan fakir miskin, cacat dan permasalahan sosial lainnya.

Mencermati bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi yang bekerja sama dengan pemerintah setempat tersebut dapat dikelompokkan menjadi kegiatan ekonomis (bantuan dana, KUBE), mental spiritual (pembangunan sarana ibadah, pengajian), dan sosial (olah raga dan kesenian, khitanan massal, pelayanan masyarakat, posyandu, pendataan PMKS, pemungutan PBB, diklat PSM, bantuan PMKS, kebersihan dan keamanan lingkungan). Hal ini sudah menggambarkan, bahwa kerja sama yang dibangun oleh organisasi dengan pemerintah setempat telah menjangkau berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Disamping adanya jaringan kerja yang dikembangkan oleh organisasi lokal, pada masyarakat akar rumput terdapat nilai-nilai solidaritas yang tumbuh dan berkembang secara dinamis. Nilai solidaritas tersebut dapat dibedakan, *pertama*, solidaritas berdasarkan kekeluargaan dan kelembagaan masyarakat. Nilai solidaritas ini terlembaga dalam perkumpulan keluarga atau silsilah, ikatan keluarga, kerukunan dan marga. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan seperti gotong royong dalam perhelatan, kesenian tradisional, dakwah dan simpan pijam. *Kedua*, solidaritas berdasarkan kearifan lokal. Nilai solidaritas ini terlembaga dalam lembaga adat, ikatan dusun dan desa, kelompok berzanji dan kesenian rebana. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan seperti pelestarian nilai-nilai budaya, suku atau marga dengan melestarikan nilai-nilai luhur, melaksanakan secara bersama-sama tradisi dan adat seperti upacara kelahiran, perkawinan, mendirikan rumah dan

bercocok tanam. *Ketiga*, solidaritas kelompok swadaya masyarakat. Nilai solidaritas ini terlembaga pada perkumpulan keagamaan (majelis ta'lim), kelompok arisan ibu-ibu dan jimpitan. *Keempat*, solidaritas berdasarkan lembaga sosial yang ada di masyarakat. Nilai-nilai solidaritas ini terlembaga dalam lembaga desa (termasuk RT/RW, dusun, kampung), dewan kelurahan dan koperasi desa.

D. PERANAN ORGANISASI LOKAL

Berbagai peranan telah dilaksanakan oleh organisasi pada tingkat akar rumput, yaitu:

1. Informasi

Organisasi menyajikan data sejumlah permasalahan dan kebutuhan masyarakat lokal, baik menyangkut permasalahan ekonomi dan sosial buaya, dan mencoba menemukan alternatif pelayanan sosial yang dibutuhkan.

2. Mediasi

Kadangkala terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah lokal dengan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Adanya kesenjangan ini akan menyebabkan "terjadinya konflik" antara kepentingan pemerintah lokal dengan kebutuhan masyarakat. Pada batas-batas tertentu, masyarakat tidak akan mendukung kegiatan pembangunan yang berasal dari pemerintah. Hal situasi ini, organisasi menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan kepentingan pemerintah lokal.

3. Advokasi

Organisasi mewakili kepentingan masyarakat untuk memperoleh hak-haknya dari pihak-pihak tertentu. Ketika ada pihak lain (pemerintah lokal, pengusaha/developer dll) yang menawarkan program kepada masyarakat, namun program tersebut akan merugikan kepentingan masyarakat, maka organisasi lokal atas nama masyarakat lokal akan melakukan upaya pembelaannya. Seperti

misalnya dalam pembebasan tanah untuk kepentingan perumahan atau industri, atau pembangunan industri yang polusinya dirasakan oleh masyarakat.

4. Pemberdayaan

Organisasi melaksanakan peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi masyarakat. Dengan adanya upaya pemberdayaan oleh organisasi lokal, maka masyarakat secara swadaya dapat menyelesaikan permasalahannya, baik menyangkut bidang ekonomis maupun sosial budaya dan politik.

Berdasarkan berbagai peranan tersebut, manfaat organisasi lokal bagi anggota, masyarakat dan pemerintah desa adalah:

1. Manfaat bagi anggota dan masyarakat

a. Manfaat ekonomis

Organisasi lokal didirikan dalam upaya peningkatan ekonomi anggota/masyarakat. Dalam kerangka ini, organisasi lokal berupaya untuk meningkatkan kemampuan anggota/masyarakat untuk memperoleh pelayanan sosial dasar secara optimal. Untuk itu, beberapa program dan kegiatan usaha ekonomis dilaksanakan oleh organisasi, seperti simpan pinjam dan pelatihan keterampilan atau usaha ekonomis. Dengan demikian, ada peranan dan kontribusi organisasi lokal terhadap pembangunan, khususnya dalam peningkatan kemakmuran masyarakat lokal.

b. Manfaat mental spiritual

Kegiatan pembangunan sangat memerlukan kapasitas mental-spiritual masyarakat, disamping kapasitas intelektual. Dengan adanya kapasitas mental-spiritual ini, maka pembangunan masyarakat dapat dilaksanakan dengan percaya diri dan jiwa keswadayaan. Adanya kesadaran kolektif bahwa melaksanakan pembangunan itu sebagai investasi jangka panjang bagi generasi

penerus. Dengan adanya kesadaran kolektif ini, maka muncul dorongan kolektif untuk melaksanakan pembangunan tanpa menunggu input-input dari pemerintah. Untuk itu, dilaksanakan program dan kegiatan yang antara lain pengajian (majelis ta'lim) dan bimbingan kerohanian.

c. Manfaat sosial budaya

Ketahanan sosial masyarakat dapat dicermati antara lain dari pola interaksi sosial yang dikembangkan antar warga masyarakat. Pola interaksi ini selanjutnya akan menggambarkan kualitas interaksi antar warga masyarakat tersebut. Pada masyarakat di perkotaan yang multikultur, seringkali ada permasalahan dalam mengembangkan pola interaksi ini karena adanya perbedaan nilai sosial budaya. Keberadaan organisasi akan melaksanakan fungsi mediasi dan informasi bagi masyarakat dalam pengembangan pola interaksi dalam masyarakat multikultur tersebut. Dengan demikian, perbedaan persepsi masyarakat dari etnis tertentu terhadap etnis lain dapat "dicairkan", sehingga tidak sampai terjadi konflik sosial.

2. Manfaat bagi pembangunan desa/kelurahan

Organisasi yang tumbuh dan dibentuk oleh masyarakat lokal pada kenyataannya memiliki kontribusi bagi pembangunan desa/kelurahan di wilayahnya, yaitu:

- a. Menyediakan informasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat
- b. Memberikan data tentang PMKS
- c. Percepatan target pembangunan desa
- d. Membantu pemerintah dalam sosialisasi pembangunan desa
- e. Sebagai mitra pemerintah
- f. Menurunkan pengangguran
- g. Peningkatan keterampilan masyarakat.
- h. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Informasi mengenai kontribusi organisasi lokal terhadap pembangunan desa tersebut menunjukkan, bahwa keberadaan organisasi memiliki manfaat yang menjangkau di luar anggotanya. Hal ini tentunya menyadarkan pemerintah desa/ kelurahan, bahwa perkumpulan sosial lokal yang diprakarsai oleh segelintir warga masyarakat di wilayahnya, telah secara nyata memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan desa/ kelurahan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian ada bab sebelumnya, disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada masyarakat akar rumput telah tumbuh dan berkembang organisasi yang dimanfaatkan sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masyarakat pada tingkat lokal.
2. Organisasi lokal telah mengembangkan organisasi dan program/ kegiatannya yang mengakomodasi berbagai perbedaan dan kebutuhan masyarakat lokal. Sasaran bidang kesejahteraan sosial (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial maupun Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) sudah menjadi perhatian sebagian besar organisasi lokal.
3. Berbagai peranan telah dilaksanakan oleh organisasi lokal, dan manfaatnya telah dirasakan oleh anggota dan masyarakat.
4. Antarorganisasi lokal telah mengembangkan jaringan dan telah membentuk embrio wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat. Di samping itu telah mengembangkan kerja sama dengan pemerintah lokal dalam pembangunan masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan temuan penelitian tersebut di atas, diajukan sasaran berikut :

1. Dilakukannya pemetaan sosial terhadap organisasi lokal secara nasional dalam upaya menemu kenali profil dan potensi organisasi lokal tersebut.
2. Isu tentang organisasi lokal perlu dikaitkan dengan wacana *civil society*, pembangunan demokrasi dan hak asasi manusia. Sehubungan dengan itu, maka organisasi lokal perlu dipertimbangkan sebagai strategi dan titik masuk dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat.

BIBLIOGRAFI

- Abu Hanifah (et.all) (1995), *Penelitian Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan melalui Nilai Kesetiakawanan Sosial*, Jakarta: Balitbang Kesos.
- Adi Suryadi Culla (1999), *Masyarakat Madani: Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*, CV. Rajawali : Jakarta.
- Bakhit, Izzedin, et.all (2001), *Menggempur Akar-Akar Kemiskinan (Attaking Root Poverty)*, Jakarta: Yayasan Komunikasi Masyarakat Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia.
- Frans, Husken (et.all) (1997), *Indonesia di Bawah Orde Baru*, Grasindo : Jakarta.
- Ife, Jimm (2002), *Community Development*, 2nd Edition, Australia /Malaysia: Cath Godfrey.

- Irawan Soehartono (1995), *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : CV Rineka Cipta.
- Koetjaraningrat (1977), *Sistem Gotong Royong dan Jiwa Tolong Menolong*. Jakarta : Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- , (1993), *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Korten, David C (1985), *Pembangunan Berpusat pada Rakyat*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Masri Singarimbun (1995), *Metode Penelitian Survey*, Jakarta : LP3 ES.
- M. Junus Melalatoa (1977), *Perwujudan Gotong Royong dalam Aktivitas Pertanian di Gayo*, Jakarta : Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Mu'man Nuryana (2002), "Peranan Lembaga Sosial Komunitas dalam Usaha Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat di Indonesia", makalah disampaikan pada diskusi pembahasan konsep Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Cipayung 26 September 2002.
- National Assosiation of Sosial Work (1997), *Encyclopedia of Sosial Work*, "Natural Helping Network", Edisi 18 Volume 1.
- Salim, Emil, "*Membangun Masyarakat Madani*", Makalah Seminar Pekerja Sosial Profesional, Jakarta, 1998.
- Setiono Tjondronegoro, "Komunikasi antara Birokraasi dan Masyarakat Desa Hanya Effektif Lewat Lembaga yang Tumbuh dari Bawah, Kompas 6 Juli 1982.
- Sudibyso Markus (2002), "Infrastruktur Sosial Masyakat Tingkat Lokal sebagai Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat", makalah disampaikan pada diskusi pembahasan konsep Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Cipayung 26 September 2002.
- Soetrisno, Loekman (1997), *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta : Yogyakarta.
- Tambunan Siahaan (1977), *Kegiatan Gotong Royong sebagai Pernyataan Dalian Na Tolu pada Masyarakat Batak-Toba*, Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.